

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kinerja Perusahaan

Kinerja Perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam meraih visi yang ditetapkan oleh perusahaan yang dilihat dari berbagai aspek dan dijadikan suatu prestasi kerja optimal yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang penting dalam proses perencanaan, pengendalian dan proses transaksional seperti merger ,akuisisi dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan yang tepat, menentukan *phaseout* terhadap unit unit bisnis perusahaan yang tidak produktif ,menetapkan balas jasa (*reward*) internal dan menentukan harga saham secara wajar [17] . Analisa kinerja perusahaan dirasakan penting tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri melainkan bagi berbagai *stakeholder*, bagi perusahaan publik dan perusahaan yang tidak memiliki kinerja yang baik dapat mempengaruhi pasar saham dan pemegang saham untuk membeli atau kepemilikan saham perusahaan [18].

Kinerja perusahaan menjadi suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu, dapat disimpulkan bahwa kinerja (*performance*) perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Manfaat penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut [18]:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya .
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Perusahaan perusahaan selama ini lebih banyak menggunakan pengukuran kinerja yang lebih menekankan pada aspek keuangan yaitu yang sering disebut pengukuran kinerja tradisional yang dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya, sedangkan pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Selama ini pengukuran kinerja perusahaan dilakukan melalui pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada sisi keuangan, seperti *Gross Profit* , *Return Equity*, *Operating Income* dan sebagainya, dimana saat ini sudah tidak dijadikan tolak ukur yang kuat pada era persaingan. Oleh karena itu dibutuhkan tolak ukur lain sebagai pelengkap keuangan yaitu non keuangan. Hal ini diperlukan karena dapat mengarahkan manajer pada tujuan profitabilitas jangka panjang, mutu yang tinggi, pelanggan yang loyal dan kepuasan kerja yang maksimal [18].

Perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, dalam praktiknya tujuan perusahaan menurut ahli keuangan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Artinya semua tujuan perusahaan didirikan adalah sama, hanya saja cara untuk mencapainya saja yang berbeda. Berikut ini beberapa tujuan perusahaan yang dirangkum dari beberapa pendapat ahli keuangan [18]:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan
2. Maksimalisasi laba
3. Menciptakan kesejahteraan bagi *Stakeholder*
4. Menciptakan citra perusahaan
5. Meningkatkan tanggung jawab sosial

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dari sisi bagaimana manajemen perusahaan merespons kondisi eksternal dan internalnya,

dengan tolok ukur tertentu dapat diketahui berapa tingkat turbulensinya dan berapa tingkat perusahaan mampu mengantisipasinya. Misalnya manajemen membuat keputusan bahwa perusahaan harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan baik dari sisi eksternal maupun internal. Seluruh kinerja perusahaan hendaknya dievaluasi setelah periode waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau periode lain yang lebih pendek waktunya seperti setiap minggu, atau periode yang lebih lama, seperti setiap kuartal [19].

Untuk dapat menerapkan Manajemen kinerja perusahaan diperlukan persyaratan dasar yang harus dipenuhi yaitu [17]:

1. Adanya suatu indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Jika perusahaan yang berorientasi pada profit, maka ukurannya adalah ukuran financial seperti omset, penjualan, laba bersih, pertumbuhan penjualan dan lain-lain. Sedangkan pada organisasi nirlaba seperti organisasi pemerintahan maka ukuran kinerjanya adalah berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
2. Semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahan yang sering disebut sebagai kontrak kinerja (*Performance contract*). Ada dua hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu akhir yang ingin dicapai (*lag*) serta program kerja untuk mencapainya (*lead*).
3. Terdapat suatu siklus manajemen kinerja perusahaan yang baku dan dipatuhi untuk dikerjakan yaitu :
  1. Perencanaan kinerja berupa penetapan indikator kinerja lengkap dengan berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan.
  2. Pelaksanaan, dimana organisasi bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
4. Adanya suatu sistem *reward and punishment* yang bersifat konstruktif dan konsisten dijalankan.
5. Terdapat suatu mekanisme *Performance appraisal* atau penilaian kinerja yang relatif objektif yaitu melibatkan berbagai pihak. Konsep yang sangat terkenal

adalah penilaian 360 derajat, dimana kinerja yang tinggi memiliki jasa yang berpikir secara subjektif .

6. Terdapat suatu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Inti dari kepemimpinan seperti ini adalah adanya suatu proses *coaching* ,*conselling* dan *empowerment* kepada para bawahan atau sumber daya manusia di dalam manusia.
7. Menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Umumnya organisasi yang berkinerja tinggi memiliki kamus kompetensi dan menerapkan kompetensi tersebut ke hal-hal penting seperti manajemen kinerja, rekrutmen seleksi, pendidikan, pengembangan pegawai dan promosi.

Kinerja perusahaan merupakan gambaran dari keberhasilan suatu perusahaan pada periode tertentu baik dinilai dari segi material atau dari segi ekonomi perusahaan. Jika dinilai dari segi material maka peningkatan kinerja perusahaan dapat dilihat dari peningkatan produktivitas, pelayanan, pelanggan dan lainnya. Apabila dinilai dari segi ekonomi perusahaan maka peningkatan kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi *Gross profit*, *Operating income* dan lainnya. ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan keseluruhan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak [20].

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) sebagai berikut [21]:

1. Perputaran kas: dimana tingkat efisiensi yang diperoleh pihak perusahaan dalam usaha hal mendayagunakan suatu persediaan kas yang ada dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang bisa diketahui dengan menghitung tingkat perputaran kas. Rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dalam membayar tagihan utang serta biaya lainnya yang berhubungan dengan penjualan.
2. Perputaran Piutang: yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan penjualan kredit pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa melihat tingkat perputaran piutangnya. Tinggi atau rendahnya perputaran piutang tersebut tergantung pada besar atau kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Perputaran modal yang cepat menandakan modal yang kembali dengan cepat.

3. Perputaran Persediaan: Persediaan merupakan unsur dari aset lancar yang masih tergolong unsur aktif dalam kegiatan perusahaan yang didapatkan secara kontinyu, perputaran persediaan yang baik untuk mempercepat pengambilan kas melalui penjualan.

Disamping perusahaan beberapa keunggulan tersebut ROA juga memiliki beberapa kelemahan yaitu [20]:

1. Jika evaluasi kinerja manajer dilakukan dengan menggunakan ROA ada kecenderungan manajer suatu Divisi didalam perusahaan tidak akan mengerjakan proyek proyek yang kurang menguntungkan jika dihitung berdasarkan ROA untuk Divisi yang dipimpin namun sebenarnya proyek tersebut memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan.
2. Manajemen cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang.

Pengukuran menggunakan ROA jika sesuai analisis ingin memperoleh ukuran terkait efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba bagi perusahaan atau pemilik. Kelemahan utama pada ROA sebagai pengukur penciptaan nilai adalah mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah menciptakan nilai [20].

Keunggulan analisis kondisi perusahaan dengan menggunakan ROA adalah [20]:

- b. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan diperhitungkan.
- c. ROA mudah dihitung dan dipahami.
- d. ROA merupakan ukuran yang sesuai diterapkan untuk semua jenis bisnis yang bertujuan mencari laba.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). Rasio ini menunjukkan kemampuan dari aset yang di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. ROA mencerminkan tingkat keuntungan bersih setelah tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki manajer. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) [20]:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (2.1)$$

### 2.1.2 Penghindaran pajak

Pajak adalah Iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan [22].

*Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [23]. Walaupun *Tax Avoidance* dianggap legal dan tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud dan tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh, sehingga yang dipentingkan adalah semangat daripada setiap tindakan itu sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang [22].

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yang berarti perusahaan menghitung atau memperhitungkan, membayar atau melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 ayat 1 undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam sistem semacam ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke negara, atau dengan kata lain melakukan penghindaran pajak, sejalan dengan hipotesis pembayaran politik dalam teori akuntansi positif. Penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan upaya untuk meminimalkan biaya politik yang dihadapi [24].

Penghindaran pajak perusahaan secara luas sebagai manajemen penurunan pendapatan kena pajak melalui aktivitas-aktivitas perencanaan pajak, yang mencakup aktivitas legal dan ilegal. Manfaat peningkatan penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar bagi perusahaan yang dapat mengurangi jumlah

beban pajak penghasilan pada laporan keuangannya dengan meningkatkan laba. Oleh sebab itu penghindaran pajak mempresentasikan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang mencakup kegiatan legal sempurna, seperti investasi pada *municipal bond*, maupun transaksi lebih agresif yang masuk dalam wilayah abu-abu, seperti *tax invension*. Penghindaran pajak juga berbeda dengan penggelapan pajak karena aktivitas penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan Undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan yang berlaku [24].

Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya secara legal ataupun ilegal sebagai berikut [25]:

1. Tingkat kerumitan sebuah perusahaan. Semakin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang. Semakin besar jumlah pajak yang terutang akan semakin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.
3. Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Resiko Deteksi, dimana resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat profitabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah terdeteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

Penghindaran pajak secara tradisional menjadi subjek penelitian di bidang akuntansi dan hukum. Diantara beberapa temuan menarik, hasilnya menunjukkan bahwa, setidaknya dalam sampel survei, penghindaran pajak dilihat lebih baik dibandingkan dengan pembayar pajak biasa. Bersamaan dengan hasil lainnya, studi

menunjukkan bahwa kecurangan pajak tidak selalu dianggap sebagai kejahatan, melainkan sebagai permainan yang dimainkan oleh orang-orang pintar. Berbeda dengan lingkungan tradisional. Dimana seorang wajib pajak hanya dapat mengurangi kewajiban pajak dengan pelaporan yang tidak sah dari mereka, dalam skema penghindaran pajak yang memungkinkan mereka untuk lebih menurunkan pendapatan yang dilaporkan. Peran dari sikap masyarakat terhadap ketidakpatuhan pajak dalam kedua bentuk dimodelkan sebagai biaya stigma sosial. Ketika skema penghindaran pajak tidak secara eksplisit ilegal, itu berarti tidak dapat diterima oleh otoritas pajak [26].

Dengan demikian *Tax Avoidance* digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak dan penghindaran pajak juga dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang harusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh (*non compliance*) [22].

Oleh karena itu perusahaan menggunakan penghindaran pajak supaya dapat menghasilkan keuntungan yang besar namun tetap berkewajiban membayar pajak untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayar sehingga memperoleh laba atau keuntungan yang tetap tinggi dan investor semakin tertarik untuk menanamkan saham dalam perusahaan tersebut. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan setelah pajak. Dengan beban pajak yang rendah maka akan meningkatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan laba yang meningkat maka kinerja perusahaan juga akan ikut meningkat [27].

*Tax Avoidance* merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dengan pengertian lain *Tax Avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak terutang hal tersebut walaupun tidak melanggar hukum (*The Letter Of The Law*). Cara untuk mengurangi penghindaran pajak adalah dengan pertukaran informasi antar anggota. Pertukaran informasi keuangan dapat dilakukan secara otomatis (*AEoI*) maupun pertukaran informasi dengan permintaan (*EoIR*). Forum global juga membuat standar pertukaran informasi dengan *Common Reporting Standar* [28].



Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu pembayaran pajak secara kas atau laba perusahaan sebelum pajak penghasilan [27]. CETR dipilih sebagai *Proxy Tax Avoidance* karena mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu CETR juga menggambarkan semua aktivitas *Tax Avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan, karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak [29].

CETR dipilih sebagai proksi *Tax Avoidance* karena mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur Penghindaran Pajak yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai berikut [30] :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(2.2)

### 2.1.3 *Leverage*

Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *Extreme*, kategori (Utang Ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dari mana sumber sumber yang layak dipakai untuk membayar utang [31].

*Leverage* merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham karena para investor pada umumnya cenderung menghindari resiko. Resiko yang timbul dalam penggunaan *Financial*

*Leverage* disebut dengan *Financial Risk*, yaitu resiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula. Keputusan pembelanjaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Pada kondisi ekonomi baik, perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri mampu menghasilkan laba bagi pemegang saham lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih kecil. Tapi pada saat kondisi ekonomi buruk, perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri akan menghasilkan laba bagi pemegang saham lebih kecil daripada perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih kecil [32].

Semakin besar rasio *leverage* menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aset semakin besar, yang berarti pula bagian resiko keuangan perusahaan meningkat. Kreditor secara umum lebih menyukai jika rasio utang yang dimiliki perusahaan lebih rendah karena semakin rendah rasio utang maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar perlindungan bagi kreditor atas risiko tidak terbayarnya utang. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari rasio *leverage* (solvabilitas) secara keseluruhan [32]:

1. Untuk mengakui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset oleh perusahaan.
6. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
7. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.

8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
9. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
10. Dan untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

*Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aset dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Penggunaan aset yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *Operating Leverage*, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut *Financial Leverage*. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan utang lebih kecil daripada tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan, sebaliknya pada kondisi ekonomi baik, suku bunga pinjaman umumnya rendah dan penjualan serta laba perusahaan meningkat. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan utang lebih besar daripada tingkat bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan [32].

Pada kondisi ekonomi normal, pada mulanya peningkatan penggunaan utang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham karena suku bunga masih relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Namun demikian jika perusahaan terus menambah utang akan mengakibatkan suku bunga akan meningkat, disebabkan resiko yang dihadapi kreditur juga naik. Sementara itu, peningkatan penjualan pada kondisi ekonomi normal relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi ekonomi baik, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham juga relatif lebih kecil dibandingkan pada kondisi ekonomi baik [32].

Adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan Rasio *Leverage* yaitu [32]:

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. mengetahui keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal.
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana kedepannya.

Dalam arti luas rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memayor seluruh kewajarannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Secara umum proksi *leverage* yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang [33]. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan perbandingan Total antara total hutang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan modal perusahaan sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya [20].

*Debt to Equity Ratio (DER)* adalah yang mengukur sejauh mana perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditor. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin besar dana yang diambil dari luar. Dilihat dari solvabilitas rasio yang tinggi relatif kurang baik, karena bila terjadi likuidasi perusahaan akan mengalami kesulitan. Semakin rendah rasio ini menggambarkan bahwa semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Jadi jika rasio ini tinggi akan berdampak pada pandangan investor atas kemampuan perusahaan memberikan *return* yang tinggi [34].

Persoalan terkait dengan hutang menjadi pembahasan yang penting bagi investor jangka panjang khususnya. Hal ini karena didalam hutang ada kewajiban atas bunga dan cicilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dengan DER adalah bahwa semakin besar porsi hutang dibanding dengan modal perusahaan dalam mengcover proses produksi dari perusahaan, maka akan memperberat beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Meskipun tidak ada batasan yang jelas tentang DER ini. DER yang nilainya  $< 1$  adalah angka aman. Karena apabila perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan masih mempunyai kemampuan dalam pembayaran kewajibannya [35].

Rasio ini dihitung dengan membagi total utang (utang jangka pendek dan utang panjang) dengan modal pemilik perusahaan. Artinya, Rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin

tinggi nilai DER maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Akan lebih aman bagi kreditor apabila memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat DER 0,5 atau 50%, karena hal ini berarti bahwa akan semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Namun ketentuan ini dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan tergantung tingkat rata-rata industri perusahaan tersebut [33].

Rasio *Leverage* merupakan Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang [32]: Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER) [33]:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.3)$$

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjuk atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain [36]. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang semakin besar. Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga semakin kecil. Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan [32].

Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*Large Firm*), perusahaan menengah (*Medium Firm*) dan perusahaan kecil (*Small Firm*). Ukuran

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara lain dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik (*Greater Control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan dapat memberikan asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investor cenderung memberikan perhatian yang khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan lebih mudah dalam memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal [32].

Besarnya suatu ukuran perusahaan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 tentang kriteria Usaha Mikro, Makro dan Menengah, maka yang dimaksud dengan [37]:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
2. Kriteria Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftara kegiatan usaha.
3. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

5. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00.
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00.
  - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.
6. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan diberika kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memeuhi kriteria hasil penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan Total aset. Aset yang dimaksud dari pengukuran diatas adalah harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Klasifikasi aset, aset tetap dan aset lainnya. Kemudian aset juga ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud . Aset lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat ditunaikan pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aset lancar merupakan aset yang paling likuid dibandingkan dengan aset lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang sudah jatuh tempo atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aset lancar [33].

Penyusunan aset lancar biasanya dimulai dari aset yang paling lancar, artinya yang paling mudah dicairkan. Aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar, aset tetap dibagi menjadi dua macam, yaitu [33]:

1. Aset tetap yang berwujud (Tampak fisik) seperti: tanah,bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya .
2. Aset tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, Contoh: Hak paten, merk dagang, goodwill, lisensi dan lain-lain.

Aset lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan kedalam aset lancar atau aset tetap. Komponen aset yang ada dalam aset lainnya adalah seperti: Bangunan dalam proses, Piutang jangka panjang dan tanah dalam penyelesaian [33].

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan setiap investasi, ukuran perusahaan juga menunjukkan adanya perbandingan resiko besar dan kecil. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan menunjukkan kapasitas perusahaan yang semakin besar [38].

Rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan sebagai Berikut [39]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Asset}) \quad (2.4)$$

### 2.1.5 Likuiditas

Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *Short Term Liquidity* [40]. Rasio Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (Likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aset lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan *Likuid* [33].



Oleh karena itu, perhitungan likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau supplier. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas [33]:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan aset lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aset lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aset lancar dan utang lancar. Serta menjadi pemacu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat

saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis [33].

Apabila perusahaan tersebut tidak sehat, maka diperkirakan perusahaan tersebut sedang dalam posisi tidak *liquid*. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangannya untuk mempertahankan agar dalam kondisi *likuid* dengan memiliki dana lancar yang lebih besar dari jumlah utang lancar yang dimiliki, ada 3 macam pengukuran rasio likuiditas yakni, *Current Ratio*, *Quick Ratio*, serta *Cash Ratio*. Apabila hasil rasio rendah maka menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak mampu membayar utang utangnya dimasa depan tepat pada waktunya atau perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendek yang dimiliki. Aset lancar yang termasuk yakni meliputi kas, piutang, surat berharga dan persediaan. Kondisi *likuid* keuangan perusahaan dikarenakan adanya perubahan keadaan serta faktor-faktor yang tinggi yang mana menunjukkan kegagalan usaha dalam menggunakan sumber dana yang tersedia secara efisien [41].

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rasio lancar menggambarkan seberapa jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Kas (*Cash on hand* dan *Cash on back*) merupakan aset yang paling lancar kemudian investasi jangka pendek (surat surat berharga), piutang usaha, piutang wesel, piutang lain lain, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya [42].

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal

perusahaan. Kewajiban lancar mencakup utang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka dan bagian utang jangka panjang lancar termasuk dalam kategori beban yang masih harus dibayar utang upah, utang bunga dan utang pajak. Perusahaan harus secara terus memantau hubungan antara kewajiban lancar dengan aset lancar untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Perusahaan yang memiliki banyak kewajiban lancar dibanding aset lancar biasanya akan mengalami kesulitan likuiditas ketika kewajiban lancarnya jatuh tempo. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, perusahaan yang memiliki rasio lancar yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal kerja (aset lancar) yang sedikit untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio lancar yang tinggi, belum tentu perusahaan dikatakan baik, rasio lancar yang tinggi dapat saja terjadi karena kurang efektifnya manajemen kas dan persediaan [42].

Tingkat likuiditas atau *Current Ratio* suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan sebagai berikut :

1. Dengan utang lancar (*Current Liabilities*) tertentu, diusahakan untuk menambah aset (*Current Assets*)
2. Dengan aset lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama sama dengan mengurangi aset lancar.

Kondisi perusahaan yang memiliki *Current Ratio* yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, Jika *Current Ratio* (Rasio lancar) terlalu tinggi dianggap juga tidak baik. Tersedianya sumber kas untuk memenuhi kewajiban tersebut berasal dari kas atau konversi kas dari aset lancar [42].

Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur [40]:

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar, Makin tinggi jumlah (kelipatan) aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan bahwa kewajiban tersebut akan dibayar.

2. Penyangga kerugian, makin besar penyangga, makin kecil resikonya. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat tersebut dilepas atau dilikuidisasi.
3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga.

Rasio lancar Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia atau. Rasio lancar menggambarkan seberapa jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancarnya [42]. Penggunaan *Current ratio* menunjukkan hubungan antara aset lancar dan hutang lancar perusahaan. Apabila perbandingan antara aset lancar tersebut lebih tinggi dari hutang jatuh tempo perusahaan maka semakin tinggi perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek [33]. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* [40]:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \quad (2.5)$$

### 2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri dari direktur dengan menggunakan persentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang diwakili oleh cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Jika kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer akan dapat mengurangi keagenan. Dalam penerapan *Corporate Governance*, komposisi dewan direksi harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan perseroan dapat memungkinkan mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis [43].

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan. Salah satu upaya perusahaan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Dengan keterlibatan pemilik saham, manajer diharapkan bertindak dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada serta memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Peran utama pemilik terkait pengembangan perusahaan adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang tepat. Dengan demikian, pemilik harus menjaga agar investasinya untung dan tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Perusahaan dengan proporsi struktur kepemilikan manajerial yang besar cenderung tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya [44].

Apabila perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh *Owner Manager*, maka *Owner Manajer*, akan mengoperasikan perusahaan hanya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan sendiri dan jika *Owner Manajer* menjual sahamnya ke pihak lain, maka hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan. Mengklasifikasikan potensi konflik antara pemegang saham dengan manajer dalam tiga tipe utama yaitu [45]:

1. Manajer mungkin akan menggunakan sumber daya perusahaan bagi kepentingan pribadi atau melakukan ekspansi yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
2. Manajer kemungkinan mempunyai horizon waktu yang lebih pendek dibanding pemegang saham, sebagai akibatnya manajer mungkin akan menyukai proyek-

proyek investasi dengan jangka waktu pengembalian singkat dibandingkan dengan yang memiliki jangka waktu panjang, karena hal tersebut berkaitan dengan kecepatan promosi jabatan.

3. Manajer dan pemegang saham kemungkinan mempunyai penilaian yang berbeda atas risiko.

*Corporate Governance* secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan *Shareholders*. Mekanisme internal merupakan cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham, Komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif dan komite audit. Sugiharti Mulya Handayani *Corporate Governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana, bahwa dana yang ditanamkan telah digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *Corporate Governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agen) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Salah satu elemen *Corporate Governance* yang penting adalah transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya [46].

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah [46]:

4. Mengurangi biaya keagenan, biaya yang terjadi karena adanya wewenang yang disalah gunakan, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
5. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik yang mampu meminimalisir risiko.
6. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
7. Mendorong pengelolaan secara profesional , transparan serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris , direksi dan RUPS.
8. Menjaga *Going Concern* (kelangsungan hidup) perusahaan.

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui 2 sudut pandang yaitu [43]:

1. Pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan, dimana pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu alat instrumen yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.
2. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan antara informasi atau *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.

Peran utama pemilik terkait pengembangan produk adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang tepat. Pemilik harus memastikan bahwa perusahaan terus memiliki ide-ide baru untuk melakukan inovasi pengembangan produk agar perusahaan dapat bertahan, berkompetisi dan berkembang lebih baik. Dengan demikian, pemilik harus menjaga agar investasinya untung, tumbuh, dan lestari sehingga nantinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh para pemilik yang juga sangat tinggi [43].

Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki oleh manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang beredar dari segi nilai ekonomisnya memiliki intensif menyelaraskan kepentingan manajemen dan *principal*. Kepemilikan manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi yang didalamnya manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham oleh manajer. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur Kepemilikan Manajerial [46]:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Jumlah Saham Beredar}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7 Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk Audit Internal yang dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen. *Size of Committe Audit* atau ukuran komite yaitu jumlah total anggota komite Audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. *Independent Audit Committe* atau jumlah komite audit independen yaitu persentase jumlah anggota komite audit independen terhadap jumlah total komite audit yang ada dalam susunan komite audit perusahaan sampel. *Finexpert* adanya seorang ahli dalam bidang keuangan (*Financial Expert*) yang bertindak sebagai konsultan [46].

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan Komite Audit adalah [46]:

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan .
2. Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :
  - a. Struktur pengendalian internal telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktik yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - b. Pelaksanaan Audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
  - c. Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.
3. Komite audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris.

Komite audit memiliki peranan penting di suatu perusahaan. Keefektivitasan mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan mengamati proses pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk mendorong adanya laporan *Financial* yang terpercaya. Hal yang penting untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan investor



terhadap perusahaan tersebut. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independen komite audit tidak dapat dipisahkan dengan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit menerapkan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi perusahaan dewan komisaris dengan internal audit [46].

Peraturan mengenai pembentukan komite audit diatur dalam peraturan Bapepam. Peraturan ini dibuat melalui Surat Edaran No.SE-03/PM/2000. Peraturan ini merekomendasikan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik harus memiliki komite audit. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang salah satunya haruslah komisaris independen yang harus berperan sebagai ketua komite. Ketentuan-ketentuan ini telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep/41/PM/2003 terutama peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit [47].

Komite audit tidak diharapkan berasal dari akuntan, akan tetapi mereka harus memahami persoalan akunting perusahaan, dan mereka harus menyelidiki permasalahan yang potensial yang ditandai oleh keadaan atau peristiwa tertentu. Anggota komite audit tidak diijinkan memiliki Prinsip *Independency* yang artinya tidak diijinkan memiliki hubungan bisnis atau hubungan kekeluargaan dengan perusahaan. Prinsip *Transparancy* artinya anggota komite audit harus melaksanakan rapat komite audit yang teratur dan selalu menghasilkan risalah rapat tertulis, dan menyiapkan laporan tertulis kepada komisaris tentang kinerja mereka. Prinsip *Accountability* berarti setiap anggota komite audit harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mendukung tugas dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir adalah prinsip *Fairness* berani dalam pengambilan keputusan anggota komite audit harus bersikap adil pada semua pihak [47].

Anggota komite Audit memiliki dua kewajiban mendasar yaitu *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty*. Kewajiban pertama yaitu *Duty of Care* terkait dengan tanggung jawab direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh ketekunan dan bertindak dengan iktikad. Kewajiban yang kedua yaitu *Duty of Loyalty* dibebankan ketika direksi membuat transaksi dengan, atau memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan tempatnya bekerja. Kewajiban ini mewajibkan komite audit untuk

menghadiri pertemuan dan secara aktif berpartisipasi dalam diskusi, serta menggunakan hak suaranya dengan wajar [47].

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
5. Kepemilikan Manajerial [46] .

Komite audit merupakan dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan dalam perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan [47]:

Ada kesan komite audit hanya menerima saja laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Walaupun memberikan masukan atau kritik, hal tersebut hanyalah atas apa yang direferensikan dalam laporan, bukan atas penyeledikan sendiri dan ada kesan bahwa pengaruh kekuasaan eksekutif lebih besar daripada komite audit [47].

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur Komite Audit [48]:

$$\text{Komite Audit} = \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.7)$$

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Adapun Review dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Marhayati Rahayu dan Bida Sari melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba dan *Leverage* terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. *Leverage* (DER) berpengaruh terhadap Kinerja keuangan [5].

2. Sihar Tambun dan Arista Endhah Maylani melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Leverage* dan *Intangible Asset* terhadap Kinerja Perusahaan dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih oleh peneliti pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan . Serta *Leverage* yang dimoderasi oleh Komite Audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [6].
3. Ni Wayan Ayu Mutiara Dewi dan Made Reina Candradewi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Employee Stock Ownership plan*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan” Penelitian dilakukan pada perusahaan Sub sektor *Investment Company* di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 dengan pengambilan sampel sebanyak 11 perusahaan. Hasil penelitian pada Uji F menunjukkan bahwa variabel *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Perusahaan. Hasil Uji t menunjukkan bahwa secara Parsial variabel *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Keuangan Perusahaan [7].
4. Mikha Tri Apriliani dan Totok Dewayanto melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 278 perusahaan Sektor Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Ukuran Dewan dan Umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan , dimana Dewan independen, Diversitas dewan perempuan dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh bagi kinerja perusahaan [8].

5. Desi Syahrani dan Husni Muarak melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan “ Tahun periode 2015-2018 dan dibuat dalam bentuk periode bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Simultan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan secara parsial profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan [9].
6. Ni Putu Ayu Megasari, I Putu Mega Juli Semara Putra dan Ni Putu Lisa Ernawatiningsih melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Struktur Aktiva, Perputaran Modal Kerja, Likuiditas dan Pendanaan Modal Kerja terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel 75 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Aktiva, Perputaran Modal Kerja dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan Pendanaan Modal Kerja berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan [10].
7. Nopi Puji Lestari dan Agung Juliarto melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Dimensi Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 70 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Konsentrasi berpengaruh negatif dengan signifikansi terhadap kinerja perusahaan , Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [11].
8. Yus Epi melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan , Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 Perusahaan *Property Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Secara simultan bersama variabel Ukuran Perusahaan,

Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan [12].

9. Inge Andhitya Rahmawati, Brady Rikumahu dan Vaya Juliana Dillak melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). Secara parsial Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Variabel Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan [13]
10. Yan Christin Br.Sembiring dan Afni Eliana Saragih melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia “. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 31 Perusahaan tetapi membuang data outlier sebanyak 7 perusahaan sehingga unit analisisnya adalah 55 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan secara simultan dan parsial [14].

**Tabel 2. 1 Hasil Review Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang Diperoleh</b>
Maryati	Kepemilikan	<u>Variabel Dependen :</u>	<u>Secar Simultan :</u>
Rahayu, dan Bida Sari (2018) [5]	Institusional, Manajemen Laba dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Perusahaan.	Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen</u> 1. <i>Leverage</i> (DER)	<i>Leverage</i> (DER) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> <i>Leverage</i> (DER) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Sihar Tambun		Pengaruh.	Variabel Dependen :	Secara Simultan :
<b>Tabel 2.1 Lanjutan</b>				
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian		Hasil yang Diperoleh
dan Arista Endhah Maylani (2020) [6]	<i>Leverage</i> dan Perubahan <i>Intangible Asset</i> terhadap Kinerja Perusahaan dengan Komite Audit sebagai variabel moderating.	Kinerja Perusahaan	<u>Variabel Independen :</u> 1. <i>Leverage</i>	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan komite audit.  <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
Ni Wayan Ayu Mutiara dan Made Reina Candradewi (2018) [7]	Pengaruh <i>Employee Stock Ownership Plan</i> (ESOP), <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.	Kinerja Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen :</u> 1. <i>Employee Stock Ownership Plan</i> (ESOP) 2. <i>Leverage</i> . 3. Ukuran Perusahaan .	<u>Secara Simultan :</u> <i>Employee Stock Ownership Plan</i> (ESOP), <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial:</u> <i>Employee Stock Ownership Plan</i> (ESOP), <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.
Mikha Tri Apriliani dan Totok Dewayanto (2018) [8]	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen :</u> 1. Ukuran Dewan 2. Dewan Independen 3. Diversitas dewan 4. Ukuran perusahaan. 5. Umur perusahaan.	<u>Secara Simultan :</u> Ukuran dewan, Dewan Independen, Diversitas dewan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> Dewan Independen, Diversitas dewan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Ukuran Dewan dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Desi Syahrani dan Husni Muarak (2020) [9]	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> Dan Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan pada BPJS ketenagakerjaan	Kinerja Perusahaan	<u>Variabel Dependen</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Profitabilitas</i> 2. Likuiditas	<u>Secara Simultan :</u> <i>Profitabilitas</i> dan Likuiditas berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> <i>Profitabilitas</i> dan Likuiditas Berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan.
Ni Putu Ayu Megasari, I Putu Mega Juli Semara Putra dan Ni Putu Lisa Ernawatiningsih (2020) [10]	Pengaruh Struktur Aktiva, Perputaran Modal Kerja, Likuiditas dan Pendanaan Modal Kerja Terhadap	Kinerja Perusahaan	<u>Variabel Dependen :</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen :</u> 1. Struktur Aktiva 2. Perputaran Modal 3. Likuiditas 4. Pendanaan Modal	<u>Secara Simultan :</u> Struktur Aktiva, Perputaran Modal, Likuiditas dan Pendanaan Modal berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial</u> Struktur Aktiva dan Perputaran

Kinerja Perusahaan.	Modal Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja
---------------------	--

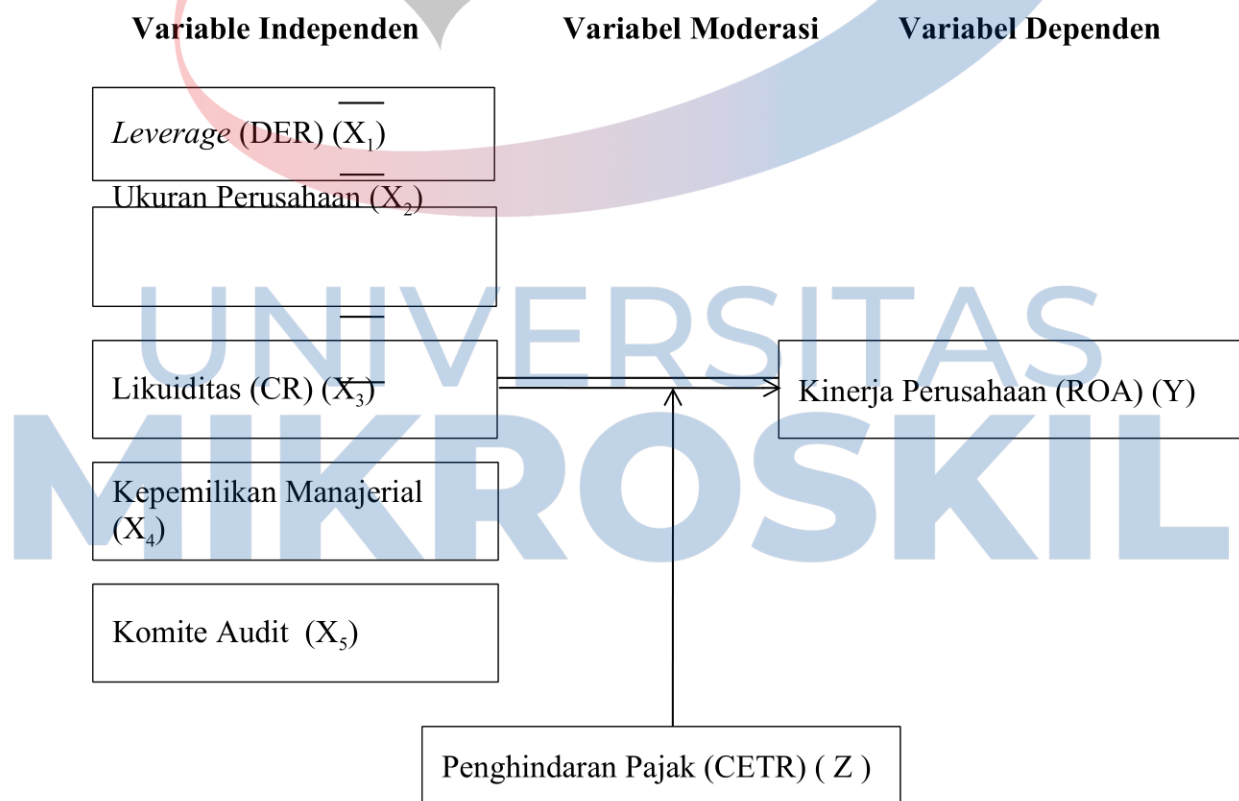
Tabel 2.1 Lanjutan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			Perusahaan. Likuiditas dan Pendanaan Modal Kerja berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan.
Nopi Puji Lestari dan Agung Juliarto (2017) [11]	Pengaruh Dimensi Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur.	<u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen :</u> 1.Konsentrasi Kepemilikan Manajerial 3.Kepemilikan Institusional	<u>Secara Simultan</u> Konsentrasi kepemilikan, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> Konsentrasi Kepemilikan dan Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan
Yus Epi (2017) [12]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Manajemen terhadap Kinerja Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<u>Variabel Dependen :</u> Kinerja Perusahaan  <u>Variabel Independen :</u> 1.Ukuran Perusahaan 2.Struktur Kepemilikan Manajerial 3.Manajemen Laba	<u>Secara Simultan :</u> Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  <u>Secara Parsial</u> Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan.
Inge Andhitya Rahmawati, Brady Rikumahu dan Vaya Juliana Dillak (2017) [13]	Pengaruh Direksi, Komisaris, Audit dan <i>Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015).	<u>Variabel Dependen :</u> Kinerja Keuangan Perusahaan / <i>Return On Asset (ROA)</i>  <u>Variabel Independen :</u> 1. Dewan Direksi 2. Dewan Komisaris 3. Komite Audit 4.CSR	<u>Secara Simultan :</u> Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan CSR berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan. Komite Audit dan CSR berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan Perusahaan
Yan Christin Br.Sembiring dan Afni Eliana Saragih (2019) [14]	Pengaruh Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa	<u>Variabel Dependen:</u> Kinerja Keuangan (ROA).  <u>Variabel Independen :</u> 1.Komisaris	<u>Secara Simultan :</u> Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja perusahaan.  <u>Secara Parsial :</u> Komisaris Independen dan

Efek Indonesia	Independen 2. Komite Audit.	Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
----------------	--------------------------------	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang diteliti dan yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to equity Ratio* (DER), Ukuran Perusahaan, Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR), Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Perusahaan yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Penelitian ini juga menggunakan Variabel moderasi yaitu Penghindaran pajak. Maka penelitian membuat kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



## 1.4 Pengembangan Hipotesis

### 1.4.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja perusahaan dengan Penghindaran pajak sebagai Variabel Moderasi

*Leverage* dengan menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan tersebut dapat melunasi kewajibannya dari modal yang dimiliki. Semakin tinggi leverage maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Penggunaan leverage mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena dalam perhitungan pajak, bunga yang dikenakan akibat penggunaan hutang dikurangkan dahulu, sehingga mengakibatkan perusahaan memperoleh keringanan pajak. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan [5].

Penghindaran Pajak sebagai variabel moderasi dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak atau pengurang beban pajak pada perusahaan dengan cara menghindari pengenaan pajak tersebut yang mengarahkannya kepada yang bukan transaksi objek pajak perusahaan atau dapat juga dilakukan dengan membebaskan bunga dan mengecilkan laba. Hal tersebut membuat perusahaan semakin baik dalam memaksimalkan laba perusahaan dan kinerja perusahaan juga semakin meningkat. Penghindaran pajak dapat memperkuat pengaruh *Leverage* terhadap kinerja perusahaan karena dengan mengefisiensi beban pajak yang dapat meningkatkan *Leverage* dan meningkatkan kinerja perusahaan serta laba perusahaan juga meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

$H_{1a}$ : *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

$H_{2a}$ : Penghindaran Pajak mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* dengan Kinerja Perusahaan.

### 1.4.2 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi.

Ukuran perusahaan dapat mengklarifikasikan besar kecilnya aset pada perusahaan dengan berbagai jenis seperti total aset, nilai pasar, saham, total

pendapatan, total penjualan dan lainnya. Dengan jumlah aset yang besar maka perusahaan dapat memanfaatkan aset tersebut untuk memperoleh laba yang besar. Dengan jumlah laba yang meningkat maka kinerja suatu perusahaan juga akan ikut meningkat. Sehingga investor akan tertarik menanamkan modalnya, karena dianggap lebih baik. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan [7].

Penghindaran pajak sebagai variabel moderasi dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak atau pengurang beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak tersebut yang mengarahkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak. Hal ini membuat perusahaan semakin baik dalam memaksimalkan laba perusahaan dan kinerja perusahaan juga semakin meningkat. Penghindaran pajak dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan karena dengan mengefisiensi beban pajak melalui beban penyusutan aset yang menambah ukuran perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan dan laba perusahaan juga meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{1b}$ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

$H_{2b}$ : Penghindaran Pajak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Kinerja perusahaan.

### **1.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi.**

Semakin tinggi rasio likuiditas dalam mendanai kewajiban jangka pendek perusahaan dengan memanfaatkan aset lancar perusahaan maka makin baik juga kinerja perusahaan yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan [9].

Penghindaran pajak sebagai variabel moderasi dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak atau pengurang beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak tersebut yang mengarahkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak. Hal ini membuat perusahaan semakin baik dalam memaksimalkan laba perusahaan dan

kinerja perusahaan juga semakin meningkat. Penghindaran pajak dapat memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kinerja perusahaan karena dengan mengefisiensi beban pajak maka kas perusahaan kemungkinan kecil berkurang, sehingga menambah nilai likuiditas serta meningkatkan kinerja perusahaan serta laba perusahaan juga meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{1c}$  : Likuiditas berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

$H_{2c}$  : Penghindaran Pajak mampu memoderasi hubungan antara Likuiditas dengan Kinerja Perusahaan.

#### **1.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi.**

Kepemilikan manajerial harus mampu memonitoring investor, berperan memberikan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja suatu perusahaan yang baik terjadi karena laba pada perusahaan meningkat dan merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang baik oleh pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham yang artinya dapat merasakan secara langsung dampak dari keputusan yang diambilnya dan membuat manajemen bekerja dengan lebih optimal. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan [11].

Penghindaran pajak sebagai variabel moderasi dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak atau pengurang beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan mengarahkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak. Hal ini membuat perusahaan semakin baik dalam memaksimalkan laba perusahaan dan kinerja perusahaan juga semakin meningkat. Penghindaran pajak dapat memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan karena dengan mengefisiensi beban pajak maka kepemilikan saham oleh manajer akan semakin meningkat serta akan lebih waspada dalam memonitoring dan mengambil keputusan yang meningkatkan kinerja perusahaan dan laba perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{1d}$ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

$H_{2d}$ : Penghindaran Pajak mampu memoderasi hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Kinerja Perusahaan.

#### **1.4.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Tugas dari komite audit adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit maka pengawasan yang dilakukan perusahaan akan semakin baik dan memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat dan dengan menguatnya komite audit perusahaan akan lebih transparan dan *reability*. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan [13].

Penghindaran pajak sebagai variabel moderasi dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak atau pengurang beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak tersebut yang mengarahkannya kepada transaksi yang bukan objek pajak. Hal ini membuat perusahaan semakin baik dalam memaksimalkan laba perusahaan dan kinerja perusahaan juga semakin meningkat. Penghindaran pajak dapat memperkuat pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan karena dengan mengefisiensi beban pajak maka komite audit akan semakin meningkat melalui pengawasan yang lebih efektif, produktif, dan bertanggung jawab serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan akurat yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{1e}$ : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

$H_{2e}$ : Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara Komite Audit dengan kinerja perusahaan.